

DESKRIPSI KOMPETENSI
JPT MADYA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

A. KOMPETENSI TEKNIS

No	NAMA JABATAN	TUGAS	DESKRIPSI KOMPETENSI TEKNIS
1	Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Memahami fungsi Ditjen PKP dalam mencapai kinerja Kementerian sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Perpres No. 12 Tahun 2014 ttg Pembentukan Kemendes, PDT, dan Trans, serta Permen Desa, PDT dan Trans No. 6 Tahun 2015. b. Mampu mendeskripsikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Ditjen PKP, dan menjelaskan regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan. c. Mampu mendeskripsikan dan memposisikan sasaran kinerja Ditjen PKP dalam sasaran kinerja Kementerian berdasarkan RPJMN 2015-2019 sesuai dengan BISNIS PROSES Kementerian d. Mampu mendeskripsikan kerangka koordinasi internal/antar Direktorat dalam menyelenggarakan fungsi Ditjen PKP e. Mampu mendeskripsikan kerangka koordinasi eksternal (dengan K/L dan lembaga lain) dalam menyelenggarakan fungsi Ditjen PKP
2	Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasanm daerah rawan bencana dan pasko konflik, serta daerah pulau kecil	a. Memahami fungsi Ditjen PDTu dalam mencapai kinerja Kementerian sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Perpres No. 12 Tahun 2014 ttg Pembentukan Kemendes, PDT, dan Trans, serta Permen Desa, PDT dan Trans No. 6 Tahun 2015 b. Mampu mendeskripsikan

No	NAMA JABATAN	TUGAS	DESKRIPSI KOMPETENSI TEKNIS
		dan terluar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Ditjen PDTu, dan menjelaskan regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan. c. Mampu mendeskripsikan dan memposisikan sasaran kinerja Ditjen PDTu dalam sasaran kinerja Kementerian berdasarkan RPJMN 2015-2019 sesuai dengan makna BISNIS PROSES Kementerian d. Mampu mendeskripsikan kerangka koordinasi internal/antar Direktorat dalam menyelenggarakan fungsi Ditjen PDTu e. Mampu mendeskripsikan kerangka koordinasi eksternal (dengan K/L dan lembaga lain) dalam menyelenggarakan fungsi Ditjen PDTu
3	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga	a. Memahami isu-isu strategis hirarki peraturan perundang-undangan, implementasi perundang-undangan mengenai otonomi daerah, dan tata hubungan antar tingkatan pemerintahan. b. Memahami isu-isu strategis di bidang regulasi yang terkait dengan kerjasama antar lembaga dalam pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi. c. Memahami esensi peraturan perundang-undangan mengenai Desa, Pemerintahann Daerah, Administrasi Pemerintahan, Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Ketransmigrasian. d. Memahami pada isu-isu strategis di bidang hubungan antar lembaga yang terkait dengan reformasi birokrasi. e. Menguasai <i>best practice</i> bisnis proses Desa, PDT, dan Transmigrasi;
4	Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan ekonomi lokal	a. Memahami isu-isu strategis hirarki peraturan perundang-undangan, implementasi perundang-undangan mengenai otonomi daerah, dan tata hubungan antar tingkatan pemerintahan. b. Memahami isu-isu strategis di bidang regulasi yang terkait dengan pengembangan ekonomi local dalam pembangunan Desa, PDT, dan

No	NAMA JABATAN	TUGAS	DESKRIPSI KOMPETENSI TEKNIS
			Transmigrasi. c. Memahami esensi peraturan perundang-undangan mengenai Desa, Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan, Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Ketransmigrasian. d. Memahami pada isu-isu strategis di bidang pengembangan ekonomi lokal yang terkait dengan reformasi birokrasi. e. Menguasai <i>best practice</i> bisnis proses Desa, PDT, dan Transmigrasi.

B. KOMPETENSI MANAJERIAL

No	NAMA KOMPETENSI	DESKRIPSI KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI
1	Integritas	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	a. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. b. Menjadi "role model" /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. c. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2	Kerjasama	Menciptakan situasi kerja sama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi	a. Menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma / etos / nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi; meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi; b. Secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi; c. Membangun konsensus untuk menggabungkan sumberdaya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara.
3	Komunikasi	Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja	a. Menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki resiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional; b. Menggunakan saluran komunikasi formal dan non formal guna mencapai kesepakatan dengan

No	NAMA KOMPETENSI	DESKRIPSI KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI
			tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional; c. Menggagas publik komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional
4	Orientasi pada Hasil	Meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi	a. Memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional; b. Memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi/nasional; c. Membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif-efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional
5	Pelayanan Publik	Mampu memastikan kebijakan – kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok /partai politik.	a. Mampu menciptakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; b. Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi/nasional; c. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik
6	Pengembangan diri dan orang lain	Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil	a. Menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi; b. Merekomendasikan/memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi; c. Memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat instansi.

No	NAMA KOMPETENSI	DESKRIPSI KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI
7	Mengelola Perubahan	Memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi/nasional	a. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional; b. Menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan; c. Secara berkelanjutan, mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan.
8	Pengambilan Keputusan	Menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang/strategis, berdampak nasional	a. Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang. b. Menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi/nasional. c. Membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul

C. KOMPETENSI SOSIOKULTURAL

NO	NAMA KOMPETENSI	DESKRIPSI KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI
1	Perekat Bangsa	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	a. Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri. b. Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang c. Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional